

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Analisis Hukum Ancaman Pidana Kasus Penguasaan Tanah Tanpa Hak Ditinjau Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU PRP No. 51 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya” Rumusan masalah dari penulisan tesis ini adalah 1) Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak? 2) Mengapa terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah tanpa hak, 3) Apakah ancaman pidana dari dari tindak penguasaan tanah tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 masih relevan dengan perkembangan jaman saat ini?. Tujuan penelitian 1) mengetahui dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin kuasa atau yang berhak beserta unsur-unsurnya, 2) Mengetahui dan menjelaskan faktor faktor penyebab terjadinya perbuatan penguasaan tanah tanpa hak, 3) mengetahui dan menjelaskan relevan atau tidaknya ancaman pidananya terhadap pelakunya sesuai dengan perkembangan jaman saat ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan, khususnya berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana penguasaan tanah di Kepolisian Resort Pati.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak dapat diartikan sama dengan istilah penyerobotan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PRP No. 51 Tahun 1960. 2) Faktor Terjadinya Perbuatan Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (a) Faktor Internal, Faktor Pendidikan dan Faktor Individu, (b) Faktor Ekstern, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Penegak Hukum dan Faktor Perkembangan Global (Teknologi). 3) Ancaman Pidana Dari Tindak Penguasaan Tanah Tanpa Hak Dalam Pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Relevan Dengan Perkembangan Zaman Saat Ini

Kata Kunci: Ancaman Pidana, Penguasaan Tanah Tanpa Hak

ABSTRACT

Thesis with the title "Legal Analysis of the Criminal Threat of Case of Land Tenure without Rights Reviewed Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU PRP No. 51 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya" formulation of the problem of writing this thesis is 1) What is meant by a criminal act of controlling land without rights? 2) Why does a criminal act of land acquisition without rights, 3) Is the criminal threat from the act of land acquisition without rights as referred to in Pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 still relevant to current developments? Research Objectives 1) Knowing and explaining what is meant by a crime of land acquisition without a power of attorney or the right and its elements, 2) Knowing and explaining factor causes the actor of land without right, 3) Knowing and explaining whether or not the relevant criminal threat to the perpetrators is in accordance with current developments.

The research method used in this study uses normative juridical research that is research conducted by examining how a rule is implemented in the field, specifically with regard to law enforcement of criminal acts of land tenure in the Pati Resort Police.

The results of this study concluded that: 1) The Criminal Act of Land Tenure without Rights can be interpreted the same as the term of seizure. In Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PRP No. 51 Tahun 1960. 2) Factors for Criminal Actions of Land Tenure without Rights (a) Internal Factors, Educational Factors and Individual Factors, b) External Factors, Economic Factors, Environmental Factors, Law Enforcement Factors, and Global Development Factors (Technology). 3) Criminal Threats From Acts of Land Tenure without Rights In Article Pasal 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Relevant to the Development of the Current Age.

Keywords: Criminal Threats, Land Tenure without Rights